



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2013**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2013



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013

PEMOHON

1. Ismiryadi dan H. Abu Bakar

TERMOHON

KPU Kota Pangkalpinang

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Rabu, 17 Juli 2013, Pukul 09.41 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saleh
2. Moh. Sulaiman

B. Termohon:

1. Sukartono (Ketua KPU Kota Pangkalpinang)

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Asli Basri
2. Jumli Jamaluddin

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.41 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan pada Pemohon untuk mengenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Terima kasih, Majelis. Nama saya Saleh, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya Moh. Sulaiman, S.H. Di belakang saya asisten saya, Siti Suci ... Sucilawati. Kami dari Kuasa Hukum Ismiryadi dan Drs. H. Abu Bakar dalam Perkara Nomor 90 Permohonan Pembatalan terkait dengan Pilkada Pangkalpinang. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan, Termohon.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ASLI BASRI

Terima kasih, Majelis. Perkenalkan bahwa nama saya Asli Basri. Di sebelah kanan saya Bapak Jumli Jamaluddin, S.H. Sebelah kanannya lagi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Prinsipal. Kami ditunjuk selaku Kuasa Hukum dari Termohon KPU Kota Pangkalpinang. Demikian, Majelis.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan Saudara Pemohon yang menguraikan apa yang jadi permohonan. Secara singkat saja! Kami sudah menerima permohonannya. Bahkan ini perbaikan ini, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Perbaikan, Majelis.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oke, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Baik, terima kasih, Majelis. Kami sudah menyerahkan tadi sebelum persidangan dimulai. Perbaikan permohonan kami yang pertama tentang perihal Permohonan Perbaikan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pangkalpinang Nomor 53 tertanggal 2 Juli 2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30, dan selanjutnya tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013.

Selanjutnya, kami langsung masuk pada *legal standing* kami. Ini perlu kami sampaikan karena Prinsipal kami adalah bakal pasangan calon yang tidak diloloskan oleh KPU. Salah satu yang ingin kami sampaikan dalam kedudukan hukum Pemohon adalah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 18 tertanggal 5 Juni 2013 yang memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai Pasangan calon, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon. Itu salah satunya, Majelis.

Selanjutnya kami masuk pada pokok permohonan. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang didukung oleh 16 partai politik: 1) PIS, PKB, PKBIB, PKPB, PPPI, RepublikaN, PDS, PDK, Pakar Pangan, Partai Buruh, PDP, Partai Barnas, PPRN, PMB, PKDI, PBR yang jika dijumlahkan sudah mencapai angka 15.039 suara atau 22,66%.

Selanjutnya, partai pendukung Pemohon pada tanggal 5 karena diundangkan oleh Termohon, pada 5 Maret 2013, jam 09.00, di acara sosialisasi telah menyerahkan ... partai yang akan mendukung telah menyerahkan kepengurusan itu kepada Termohon.

Selanjutnya, tahapan yang dilakukan oleh Termohon, yakni pendaftaran itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Maret 2013, dan Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon adalah pada tanggal 18 Maret 2013 dengan 16 partai pengusung sebanyak 22,66%.

Nah, selanjutnya dalam pendaftaran itu sesuai dengan ceklis yang diberikan oleh Termohon tentang surat pernyataan kesepakatan antara partai-partai politik peserta pemilihan umum yang bergabung untuk mencalonkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Termohon telah dinyatakan ada, dan ini juga telah diperkuat oleh Putusan PTUN Palembang Nomor 18.

Selanjutnya di poin 12, halaman 10. Bahwa rupanya Termohon setelah menerima pendaftaran dari Pemohon, Termohon tidak melakukan verifikasi, penelitian, dan klarifikasi terhadap pengurus partai politik pengusung Pemohon. Hal ini diketahui pada tanggal 26 Februari

2013 di waktu Pemohon melakukan klarifikasi ke Partai PIS dengan hanya membawa berkasnya Naziarto, S.H., M.H. dan Nursaadah, M.M.

Nah selanjutnya, dari awal memang Termohon ada dugaan keras untuk menjegal pencalonan Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan khusus pada tanggal 26 Maret 2013, jam 21.20, dimana Termohon waktu itu adalah Saiful Karim yang kemudian dipecat oleh DKPP mengadakan pertemuan khusus dengan timnya Naziarto, yang namanya adalah Dani di depan Hotel Seven Eleven ... di Seven Eleven depan Hotel Kaisar.

Terus selanjutnya, kemudian pada tanggal 1 April 2013 perwakilan Pemohon menemui Termohon dan dalam pertemuan tersebut lagi-lagi ada pengakuan dari Termohon bahwa berkas pengurus partai pendukung Pemohon yang diserahkan, baik yang tanggal 5 maupun tanggal 18 Maret, juga banyak yang hilang. Dan atas adanya pengakuan dari Termohon tersebut, Pemohon kemudian memberikan kembali susunan pengurus 16 partai politik pengusung Pemohon dan ini ada tanda terimanya.

Selanjutnya, atas tidak dilakukannya verifikasi Panwas Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 001 agar Termohon melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait dengan berkasnya Pemohon. Karena di ... ketika melakukan verifikasi pertama hanya membawa berkasnya Naziarto dan Nursaadah.

Selanjutnya di poin 18 halaman 12, di media massa *Babel Pos* walaupun Termohon terbukti tidak melakukan verifikasi, tetapi Termohon berbohong di media, yaitu di *Babel Pos* tanggal 1 April 2013 dengan menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkasnya Pemohon.

Nah, setelah didatangi oleh Pemohon pada tanggal dan mendapatkan rekomendasi dari panwas tanggal 2 April 2013, barulah kemudian Termohon melakukan klarifikasi terkait dengan partai politik pengusung Pemohon, yakni pada tanggal 3 sampai tanggal 4 April 2013, yang terakhir melakukan klarifikasi adalah di Partai RepublikaN, itu tanggal 4 April jam 18.00 WIB.

Nah, selanjutnya Termohon, dalam hal ini Saiful Karim sebelum dipecat, memang sengaja menyebarkan draf penelitian administrasi milik Pemohon ke masyarakat luas Kota Pangkalpinang sebelum dilakukan verifikasi, maupun klarifikasi, yakni pada tanggal 2 April 2013. Seolah-olah Pemohon telah divonis oleh Termohon tidak memenuhi syarat, padahal verifikasi dan klarifikasi belum dilakukan oleh Termohon. Termasuk juga Saiful Karim di kala itu masih Komisioner KPU, menyebarkan draf hasil penelitian administrasi Pemohon ke pengurus Partai PPPI pada saat melakukan verifikasi ke PPPI pada siang hari, tanggal 4 April 2013.

Selanjutnya, ini yang sangat mengagetkan ternyata dilakukan klarifikasi pada tanggal 4 April dan 3 Komisioner KPU masih ada di Jakarta, dua Komisioner KPU ternyata telah mengeluarkan surat

Keputusan Nomor 087 tertanggal 4 April dan diserahkan kepada Pemohon pada jam 23.35 dan ini di luar batas kewajaran. Dan sekaligus kami tegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan yang diberikan pada partai pengusung Pemohon.

Selanjutnya, di halaman 23, ternyata ditemukan fakta bahwa Pasangan Naziarto, S.H., M.H. dan Nursaadah hanya didukung oleh Partai PPRN sebanyak ... PPRN, Partai Barnas, PNBKI, PKNU yang jumlah keseluruhannya tidak mencapai 15%, yakin 7,53%. Hal ini jelas karena Termohon meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat 15%, ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, di halaman 24 poin 31. Ada seorang yang aktif bahkan tercatat sebagai 3 pengurus partai sekaligus, namanya adalah Piscal Pebrizal di Sekretaris Partai PKBIB masuk, di PKPI juga masuk, di Partai Pakar Pangan juga masuk, dan berkas yang dikeluarkan oleh Piscal Pebrizal juga diloloskan oleh Termohon.

Selanjutnya atas kejanggalan itu, kemudian langkah yang dilakukan oleh Pemohon adalah tanggal 6 April melaporkan ke Panwas Kota Pangkalpinang, melaporkan ke pihak kepolisian tanggal 9 April, ke Polres Kota Pangkalpinang, dan sekaligus melaporkan juga ke ... melaporkan Termohon ke DKPP, yaitu pada tanggal 8 April 2013.

Dan juga atas tindakan Termohon yang tidak menjalankan tahapan dan proses sesuai dengan aturan, Panwas Kota Pangkalpinang juga telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 002 dengan menonaktifkan dua orang komisioner, yaitu Ketuanya Ivan ... Riwan Nevo Setiyawan dan Ivan Fikri.

Selanjutnya, DKPP juga telah memecat 3 orang komisioner karena Termohon tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dua orang yang lain juga diberikan surat peringatan.

Nah, DKPP berkesimpulan bahwa Termohon telah sengaja menimbulkan terhalangnya Pemohon untuk lolos sebagai pasangan calon.

Kemudian di halaman 26 ... 26, Termohon kemudian mengeluarkan ... tertanggal 26 April tetap mengeluarkan walaupun sudah ada Putusan DKPP dengan Surat Nomor 30 tentang Penetapan Pasangan Calon yang keseluruhannya ada tujuh pasangan calon dan tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon walikota. Ini oleh Pemohon dianggap mengaburkan dan menutup peluang Pemohon.

Kemudian atas keluarnya SK Nomor 30 itu, Pemohon pada tanggal 10 Mei 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, register dengan Nomor 18. Dan pada tanggal 5 Juni 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan Pemohon dan Pemohon[sic!] telah diperintahkan untuk mencabut SK Nomor 30 tentang Penetapan Pasangan Calon dan memerintahkan kepada Termohon untuk meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon.

Selanjutnya di halaman 29, atas adanya putusan dari DKPP dan adanya putusan TUN, Pemohon telah berusaha dan berkirim surat beberapa kali ke Termohon untuk di masukkan sebagai pasangan calon. Namun Termohon bersikukuh pada putusannya yang nyata-nyata tidak sesuai dengan aturan dan kemudian Termohon menyatakan banding.

Nah, bagi Pemohon, ini adalah niat dari awal Termohon untuk menjegal Pemohon karena Pemohon adalah tokoh dan lahir ... yang lahir dan besar di ... dan hari ini Pemohon menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Kemudian di halaman 30 poin 50. Bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan, yakni Putusan PTUN Palembang. Padahal Pemohon telah berulang kali setelah adanya Putusan PTUN Palembang meminta untuk dimasukkan sebagai pasangan calon.

Kemudian pada tanggal 12 Juni 2013, Pemohon juga telah menemui Termohon meminta untuk dimasukkan, tapi bahasanya Termohon di kala itu tanpa ... di kala itu masih belum memegang putusan dengan bahasa "Pokoknya banding," tanpa alasan yang jelas.

Kemudian di poin 52. Berdasarkan fakta tersebut di atas, bagi Pemohon ini adalah rangkaian fakta Termohon telah sengaja menghalang-halangi Pemohon yang nyata-nyata telah memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota, namun tidak diloloskan oleh Pemohon[sic!].

Nah, berikutnya pada saat tanggal 26 Juni 2013, ini adalah pemilihan ... hari pemilihan. Banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena banyak masyarakat yang menginginkan Pemohon untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang. Hal ini karena ulah Termohon yang menjalankan tahapan dan proses Pemilukada Kota Pangkalpinang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian banyak juga masyarakat yang mendatangi Pemohon, menyerahkan kartu undangan asli dan kami ini akan jadikan bukti, Majelis.

Kemudian (...)

9. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Langsung saja ke petitum itu selanjutnya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Ya, satu lagi Majelis sebelum petitum. Dengan tidak diloloskannya Pemohon, angka golput itu mencapai 52,91% dari jumlah DPT 139.498, itu Majelis.

Kemudian kami masuk pada petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/KPTS/KPU-Kota/009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013, Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/KPTS dan selanjutnya tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 26 April 2013, berita ... dan Berita Acara Nomor 079/BA dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan surat keputusan baru dengan memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
4. Menyatakan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Naziarto , S.H., M.H, dan Dra. Nursaadah, M.M. didiskualifikasi.
5. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan pemungutan suara ulang, paling lambat 1 bulan sejak putusan ini dibacakan dengan mengikutsertakan Pemohon dan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 1.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Saleh, S.H., M.H dan Moh. Sulaiman, S.H. Terima kasih, Majelis.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baiklah Saudara Pemohon, telah menguraikan tentang permohonannya. Saya ingin bertanya, itu verifikasi itu dilakukan tanggal berapa itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Yang punya Pemohon tidak dilakukan, Majelis.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Tanggal anunya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Tetapi setelah didatangi, baru pada tanggal 3 dan tanggal 4, Majelis. Jadi (...)

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

3, 4 apa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

April 2013. Jadi mendaftar tanggal 18 Maret 2013, kemudian tidak diapa-apakan. Setelah itu tanggal 1 April, Pemohon mendatangi Termohon, Majelis.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

He em.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Baru tanggal 3 dan 4 dilakukan verifikasi dan klarifikasi, Majelis.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oke, terus keputusan PTUN tadi tanggal berapa itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

5 Juni, Majelis.

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

5 Juni ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

5 Juni, Majelis. Tanggal 10 mendaftar, tanggal 5 Juni itu ada putusan untuk memerin ... dan memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pemohon. Namun enggak dijalankan, Majelis. Terima kasih.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oke, saya ingin me ... beberapa saja nanti Majelis akan memberikan lebih lengkap lagi. Terkait ini Saudara Naziarto ini kan Saudara minta supaya tidak diikutsertakan dalam pemilukada ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Betul.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Nanti Saudara dari KPU, KPUD memberi tahu kepada yang bersangkutan atas permohonan ini supaya sebagai Terkait dia bisa mempertahankan diri, atau membela, atau menyanggah dari apa yang telah dimohonkan kepada Pemohon tersebut.

Kemudian di dalam petitum ini, Saudara ... ketika Saudara menginginkan suatu permohonan tentang pemungutan suara ulang, ini Saudara tidak termasuk mengikutsertakan Saudara Nomor Urut 1 ya, Naziarto ya, yang sudah didiskualifikasi ya? Baiklah, *he em*.

Jadi pemungutan suara ulang ya? Baik, *he eh*. Saya kira itu. Silakan, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, meski Saudara sudah memperbaiki permohonan Saudara. Tapi Saudara masih punya hak untuk mendapatkan nasihat Hakim dan kalau dipandang perlu, kalau punya hak pula memperbaiki lagi.

Oleh karena itu, Saudara akan diberikan beberapa catatan terkait dengan nasihat itu dan nanti akan diberi waktu untuk memperbaiki. Tapi karena ini sidang yang diikat oleh ketentuan waktu yang terbatas, maka Saudara harus bekerja keras untuk sebisa-bisa diperbaiki secara baik.

Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa karena ini bakal pasangan calon, *gitu* ya. Saudara harus baca banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan *standing* kepada bakal pasangan calon. Di situ Saudara tangkap apa ... apa namanya ... alasan Mahkamah hingga memberikan *standing* kepada pasangan calon itu? Yang pada pokoknya sebenarnya adalah terhalangnya hak politik Pemohon atau bakal pasangan calon itu dalam pemilukada.

Oleh karena itu, ini harus di-*explore* sejak *legal standing*. Kemudian, si *legal standing* cukup ... apa namanya ... garis besar saja kerugiannya itu terkait dengan soal hak-hak politik, hak konstitusional di bidang politik.

Kemudian berikutnya lagi adalah dalam pokok permohonan itu, pelanggaran-pelanggaran itu Saudara terlalu ... apa namanya ... rinci, sehingga kabur itu, sangat banyak dan kabur. Supaya jelas, coba dikelompokkan dengan berpatokan pada petitum Saudara. Saudara ini kan yang dimohonkan kalau soal tidak sah dan batal itu, ikutan saja sebenarnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah Saudara minta supaya ter ... apa namanya ... Pemohon ini masuk sebagai pasangan calon.

Ha, di-*explore* sejauh terkait dengan pelanggaran hak politik Pemohon, itu satu soal sendiri, *gitu lho*. Jangan satu, dua, tiga, sampai 46 itu enggak fokus Saudara, enggak fokus. Soal pelanggaran hak konstitusional sehingga dia enggak bisa ikut pemilukada, itu seperti apa? Fokusnya di situ.

Kemudian yang kedua, Saudara kan minta supaya Pasangan Nomor Urut 1 itu didiskualifikasi, sampai sejauh ini Saudara tidak menguraikan apa alasan dia harus didiskualifikasi? Kalau toh ada itu sangat-sangat *minor* itu, enggak ... alasannya itu enggak signifikan. Mengapa dia harus didiskualifikasi?

Bahwa kalau Saudara minta supaya tidak batal itu karena KPU menyelenggarakan menurut Saudara itu prosesnya terjadi banyak pelanggaran, itu sudah ada. Makanya diurutkan, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, pelanggaran oleh KPU yang mengakibatkan Pemohon itu kehilangan hak politik, baru pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Naziarto itu apa, sehingga dia harus didiskualifikasi? Begitu seharusnya.

Dan yang lebih penting, itu Saudara mesti tahu kapan itu tahap-tahap itu diselenggarakan dan kapan dia ditinggalkan? Kapan pula dia memperoleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Kapan pula memperoleh putusan dari DKPP? Kapan pula dilaporkan pengawas? Apa tindak lanjutnya pengawas? Dilaporkan ke polisi apa enggak? Apa tindak lanjutnya polisi? Itu harus di ... jadi kapan berbanding dengan kapannya tahapan itu harus bersanding, sehingga ... apa namanya ... jelas, *gitu ya*, itu.

Ini kepada Termohon siap-siap untuk direspons ini, apa yang dilakukan, dikatakan, atau didalilkan oleh dia itu dengan nasihat-nasihat tadi, kan Anda lebih mudah karena sudah digolong-golongkan, siapa melanggar apa? Mengakibatkan kerugian siapa? Kapan terjadi? Di mana terjadi? Bagaimana terjadinya? Itu harus (*suara tidak terdengar jelas*).

Nah, di sini, wah karena Anda terlalu bersemangat, *rigid* sekali sampai 46, agak susah ini. Digolong-golongkan saja, *gitu ya*. Baik, terima kasih.

27. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, jadi mengulang saja apa yang disampaikan oleh Hakim sebelumnya. Karena sebetulnya prosesnya itu kita ikuti saja proses bagaimana penyelenggaraan dilakukan.

Pasti yang pertama kali adalah Pemohon mendaftar, kan *gitu*, mendaftar itu yang pertama harus dilakukan adalah sesuai dengan persyaratan. Persyaratan itu salah satu di antaranya adalah kapan mendaftar, kapan ditutup pendaftaran. Lalu apa yang terjadi dengan Anda? Apakah Anda punya bukti bahwa pendaftaran itu telah dilakukan sebagaimana mestinya? Waktunya mendaftar?

Lalu yang kedua mengenai syarat-syarat. Syarat-syarat administratif Anda itu sudah dilengkapi belum? Kalau toh itu belum lengkap, lalu sebetulnya hak Anda itu apa? Apakah terhadap syarat yang belum lengkap itu Anda mempunyai hak untuk memperbaiki? Dan memperbaiki itu kalau kemudian itu disarankan oleh Termohon, sudah Anda lakukan apa belum perbaikannya? Ya kan. Anda mendalilkan di sini telah didukung oleh partai-partai nonparlemen yang cukup.

Masalahnya adalah apakah itu menjadi alasan dari Termohon untuk tidak meloloskan Anda? Kalau katakan saja itu alasannya, pasti itu didasarkan verifikasi. Dalam verifikasi itu kemungkinannya dua, partai-partai yang mendukung Anda itu setelah dijumlah tidak memenuhi persyaratan 15%, itu mungkin jadi alasannya. Atau yang lain bahwa tidak semua partai itu sebetulnya cukup dibuktikan oleh dukungan itu karena setelah diverifikasi, ada partai yang tidak mendukung, mana ini yang menyebabkan?

Oleh karena itu, bicara tentang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi ada dua hal, ada dua pihak. Menurut Anda memenuhi syarat, tapi apakah Pemohon menyatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat? Itu ... itu dua hal itu yang harus Anda buktikan.

Jadi, lalu ini sebetulnya perbedaan tentang hal tersebut ditutup oleh putusan PTUN. Apa sih yang Anda masalahkan di PTUN? Apakah yang di PTUN itu yang dijadikan dasar adalah alasan penolakan dari Pemohon ... Termohon itu ataukah yang lain? Jangan-jangan yang diputus di PTUN itu adalah persoalan lain dari hal yang digunakan oleh Pemohon untuk menolak Anda, ya kan? Mungkin dari kasus yang persoalan Anda sampaikan itu Anda dimenangkan, tapi justru bukan yang dimenangkan itu yang menjadi alasan bagi Termohon untuk menolak Anda. Ini bisa seperti itu. Ataukah seluruh alasan penolakan itu kemudian diajukan di PTUN dan itu menjadi pertimbangan dari keseluruhan yang Anda jadi keberatan? Itu harus dikonstruksi di situ. Jadi, ini hal-hal yang supaya dipermudah yang sampai 40 poin tadi sebetulnya bisa dirangkaikan seperti itu.

Saya mohon informasi nanti di dalam menyusun permohonan itu ya, Putusan PTUN itu 5 Juni, lalu yang belum di ... yang belum saya dapatkan adalah kapan sebetulnya pelaksanaan pemilihan, kapan itu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Tanggal 26 Juni, Majelis.

29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

26 Juni, ya. Jadi, itu semua supaya diurut ya, kejadian-kejadian itu karena itu nanti akan bermakna bagi keseluruhan pemeriksaan.

Yang kemudian, putusan DKPP itu kapan? Yang menskors tiga komisioner itu? Enggak usah dijawab sekaranglah! Karena itu semua akan menggambarkan proses ini semua, ya. Anda mestinya punya ... punya insting bahwa tanggal-tanggal itu bermakna, ya, tapi yang pada ... ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

16 Mei.

31. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

16 Mei. Mei, Juni, ya? Lalu persoalan juga berikutnya adalah kalau itu 16 Mei, apakah SK-SK yang dikeluarkan oleh KPU itu, yang ditandatangani oleh orang yang beda dari komisaris ... Komisioner KPU itu, lalu itu semua juga mempunyai makna, ya. Dari segi hukum mestinya Anda punya naluri untuk mempermasalahkan itu.

Meskipun ini masih waktu yang dipunyai oleh Pemohon, Termohonnya datang sendiri ini KPU? Ada? Coba itu dipakai, nyalakan! Ini Komisioner KPU?

32. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, Ketua KPU Kota Pangkalpinang.

33. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ketua KPU tidak termasuk yang kena sanksi dari DKPP? Ya? Enggak, ini saja biar jawab dia.

34. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Dari hasil (...)

35. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Itu ditarik saja biar Anda tidak susah. Nah.

36. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, Putusan DKPP tanggal 16, saya termasuk yang mendapat surat peringatan.

37. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Surat peringatan?

38. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Berapa sih komisioner di sana?

40. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Lima orang, Pak.

41. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Lima orang. Yang diberhentikan DKPP?

42. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Tiga, Pak.

43. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tiga. Jadi, sekarang tinggal dua?

44. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Tinggal dua, kemudian dilakukan PAW dua orang tertanggal 6 Juni.

45. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, dari anggota yang aslinya lima itu, tertinggal dua, Anda lalu ditambah lagi?

46. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ditambah lagi PAW dua orang.

47. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Dua orang. Jadi, empat sekarang anggotanya?

48. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, empat, Pak.

49. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Empat orang. Selama Anda sudah menggantikan, Anda mengeluarkan SK-SK?

50. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ada, Pak, mengeluarkan SK, Pak.

51. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

SK tentang siapa yang memenuhi syarat itu? Anda atau yang lama?

52. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Itu masih yang lama, Pak.

53. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oh, masih yang lama, jadi bukan Anda. Saya ingin tanya saja, supaya nanti dalam proses berikutnya juga membantu kelancaran itu. Dalam SK tentang calon itu ada tujuh calon, ya?

54. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, betul, Pak.

55. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ada tujuh calon. Masih ingat enggak dari tujuh calon itu berapa calon yang dicalonkan oleh partai yang mempunyai kursi di DPRD?

56. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Masih, Pak.

57. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Berapa itu? Berapa orang?

58. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Yang dari kursi DPRD ada enam pasangan, satu pasangan dari sisa yang tidak memiliki kursi di DPRD kota.

59. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, seluruhnya ini adalah berdasarkan perhitungan suara, ya? Tidak ada *independent*?

60. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Tidak ada, Pak.

61. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tidak ada *independent*.

62. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Maaf, Pak, ada satu kemarin yang mencalonkan *independent*, tapi tidak memenuhi syarat.

63. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, yang tujuh ini tidak ada yang dari *independent*?

64. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Tidak ada, Pak.

65. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Untuk dukungan partai yang punya kursi itu minimal berapa persen?

66. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

15%, Pak.

67. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

15%. Terus yang di luar itu, 15% juga, dari suara yang partai yang tidak punya di situ?

68. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, dari yang ... berdasarkan yang tidak mempunyai kursi, itu sisa suaranya ada 29,03%.

69. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

29,03%?

70. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

29,03%.

71. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ini kemudian yang digunakan?

72. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Oleh Pasangan Naziarto, terus Pasangan Ismiryadi, dan Pasangan Renaldi.

73. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, 2,9% diperebutkan berapa calon waktu itu?

74. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Tiga, Pak.

75. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tiga calon. Dari 2,9% diperebutkan tiga calon yang seharusnya masing-masing calon itu bisa mendapatkan minimal berapa? 15% juga?

76. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, kalau itu seharusnya hanya bisa terpenuhi untuk satu pasangan calon, yaitu 15%, Pak.

77. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pasangan calon 15%, dua tidak memenuhi karena kurang 30, ya?

78. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oh, kurang 30. Jadi, dari enam ini menggunakan 15% yang ada di parlemen. 15% di parlemen. 15x6 itu 30. 30, 90. 90%, 10 persennya itu.

Nah, 90% ini apa bisa terbagi habis sampai bisa memenuhi enam orang? Artinya, ada partai yang enam ... enam orang calon, ya? Artinya, ada partai yang enggak mengambil begitu banyak, sehingga partai lain itu lebih sedikit dari 15%? Komposisinya *gimana*?

80. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Bisa saya melanjutkan?

81. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

He eh.

82. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Untuk penghitungan enam pasang yang lain, itu berdasarkan kursi, Pak.

83. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

84. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Jadi, kursi DPRD Kota Pangkalpinang berjumlah 25 kursi.

85. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

25 kursi?

86. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya. Jadi, hitungan kami untuk 25 kursi, satu kursi nilainya 4%. Ha jadi, kalau mereka memiliki empat kursi, itu bisa mengajukan satu pasangan calon karena hitungannya empat kali empat dia 16%.

87. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Kursi itu dihitung kursinya atau dihitung partainya?

88. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Kursi, Pak, hitungan kursi itu, Pak.

89. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Betul, begitu?

90. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, betul, Pak.

91. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Padahal kan perhitungannya partai yang calonnya?

92. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Hitungannya ke partai, cuma kita tengok kalau partainya dapat empat kursi, berarti hitungannya 16% partai bisa mengajukan pasangan calon.

93. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, empat kursi, kan?

94. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, kalau 25 dibagi empat, itu berapa itu? Enam?

96. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Enam ... enam kursi.

97. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, enam kan. Lalu apa pas itu? Pasnya artinya, setiap partai itu punya empat semua rata-rata. Apa tidak mungkin satu partai itu kemudian lebih dari empat, pada satu partai lebih dari empat, yang lain sudah kehilangan kursinya? Itu yang menghitung dulu Anda atau bukan?

98. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ya, Pak, ada timnya.

99. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

He eh.

100. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Jadi, hitungannya di Peraturan KPU Nomor 9 itu kalau dihitung berdasarkan kursi, itu tidak boleh bercampur dengan yang perhitungan sisa (...)

101. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ndak, ada partai yang lebih dari empat kursi, enggak?

102. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ada, Pak. Rata-rata empat kursi, cuma ada satu partai itu satu kursi. Jadi, seperti yang pasangan (...)

103. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ndak, bukan rata-rata! Kalau kemudian dia satu partai itu mendapatkan tiga, ya kan? Sedangkan yang satu itu sudah dimiliki lebihnya partai lain, yang tiga itu tidak bisa kemudian melakukan dukungan bersama dengan yang dia sudah dukung yang lain. Ya, coba nanti perhitungannya, ya.

104. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Bisa saya jelaskan (...)

105. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sa ... saya diberi, bagaimana menghitungnya dulu.

106. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti dalam (...)

107. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tertulis saja nanti! Tertulis saja, ya! Karena saya belum baca ... apa itu ... Keputusan Nomor 30-nya. Saya tadi suruh cari, belum sempat. Jadi, saya ingin tahu bahwa kok bisa pas benar, *gitu*. Karena kalau satu partai itu dapat tiga, untuk satu itu, dia enggak bisa minta partai yang sudah mencalonkan, meskipun partai sudah mencalonkan lebih.

108. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

(Suara tidak terdengar jelas)?

109. TERMOHON: SUKARTONO (KETUA KPU KOTA PANGKALPINANG)

Ada, Pak.

110. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

(Suara tidak terdengar jelas).

111. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, makanya coba nanti *gimana* hitungannya. Saya agak ... agak ... agak anu ... menghitung itu. Ya, nanti coba dikasih, ya. Terima kasih.

112. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, nanti kelompok-kelompoknya itu golongan partai A, B, C dukung siapa atau apa, begitu (...)

113. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kursinya berapa.

114. KETUA: ACHMAD SODIKI

Kursinya berapa. Tapi yang ini kan *ndak* bisa mendukung yang lain, kan? *Gitu*, toh? Ya, hitungannya kan *gimana*? Ya, jadi itu supaya nanti lebih jelas, ya. Dan itu tadi penting Saudara Pemohon. Kronologis itu penting sekali karena kemungkinan bahwa ... apa ... diulang dan sebagainya kan juga tergantung pada kemungkinan masih bisanya itu diulang dan sebagainya.

Jadi, kronologisnya itu yang penting, tanggal sekian. Ini Saudara tadi belum ... belum mengurutkan itu secara lebih rinci, begitu. Sehingga nanti mulai dari pendaftaran ... mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi, kemudian pengumuman, kemudian penetapan, kemudian pemilunya sendiri, kemudian Saudara gugat di PTUN kapan, itu semuanya kan itu ada urut-urutannya. Ini Saudara lebih ... lebih.

Baiklah, Saudara sudah banyak sekali diberikan ... apa ... petunjuk dan Saudara diberi kesempatan ini karena sidang-sidang di sini ketat sekali ya, Saudara diberi kesempatan sampai nanti sore jam ... memperbaiki, jam 16.00 WIB. Jadi, masih ada (...)

115. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Diserahkan (...)

116. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, diserahkan ke (...)

117. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jam 16.00 WIB.

118. KKETUA: ACHMAD SODIKI

Diserahkan ke Panitera, ya. Diserahkan di sini.

119. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jam 16.00 WIB.

120. KETUA: ACHMAD SODIKI

Jam 16.00 WIB, ya.

121. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan Anda mengambil untuk menjawab.

122. KETUA: ACHMAD SODIKI

Dan nanti Saudara Termohon, ya itu mengambil di ... perbaikan di sini, ya. Kalau sampai jam 16.00 WIB tidak menyerahkan perbaikan, berarti ini yang dipakai, ya.

Baiklah, ter ... Terkait dipanggil. Dan kemudian sidang ini akan dilanjutkan besok hari Kamis tanggal 18 Juli, pukul 08.30 WIB. Jadi, Saudara masih ada kesempatan 12 jam lebih untuk menjawab ini untuk menanggapi.

123. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sambil sahur sekalian.

124. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, saya kira cukup, ya. Sidang saya nyatakan selesai (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Agendanya besok, Majelis? Apa sekaligus saksi atau *gimana?*

126. KETUA: ACHMAD SODIKI

Boleh, silakan kalau Saudara (...)

127. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau sudah siap (...)

128. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, *he eh.*

129. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Kami akan koordinasikan, Majelis, dengan Prinsipal.

130. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, tapi kan Saudara ini kan masalah surat-surat yang paling banyak, toh?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Ya.

132. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saksinya berapa?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH

Ada sekitar 11 orang, Majelis. Ini mayoritas adalah pengurus partai pendukung, Majelis.

134. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh, ya. Itu juga sekaligus itu ... apa ... diteliti betul itu tentang siapa yang sebetulnya mempunyai kewenangan merekomendasi atau partai. Karena kadang-kadang mereka itu wakil ketua merekomendasi diri sendiri, ketuanya sendiri, itu nanti juga bisa menjadi pertimbangan Saudara atau untuk (*suara tidak terdengar jelas*).

Saya kira begitu, saya kira sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 17 Juli 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004